**Akuntabilitas Anggaran Dalam Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu (Covid-19) Tahun 2021**

**Sri Suharti 1**

1)Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

1 E-mail: [s.suharti1367@gmail.com](mailto:s.suharti1367@gmail.com)

|  |  |
| --- | --- |
| **ARTICLE HISTORY**  Received: October 20, 2022  Revised: October 25, 2022  Accepted: November, 25, 2022  Available online: December 31, 2022 | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Anggaran dalam Penanggulangan Bencana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini diambil dengan metode purposive sampling. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yaitu: Sekretaris, Kasubbag Program Umum dan Perencanaan, Petugas dan Pegawai BPBD Provinsi Bengkulu serta masyarakat sekitar lokasi bencana. Langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini adalah, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan Akuntabilitas Anggaran Penanggulangan Bencana 2021 (Covid-19) belum efektif karena masih ada kekurangan imitasi Sumber Daya dalam Pengelolaan, Ketepatan dan tujuan serta sasaran. serta perbedaan kesesuaian harga pada saat normal dan saat bencana. ABSTRACT This study aims to determine Budget Accountability in Disaster Management. The research method used in this study is a qualitative research method. Informants in this study were taken by purposive sampling method. There were 5 informants in this study, namely: Secretary, Head of Subsection for General and Planning Programs, Bengkulu Province BPBD Officers and Employees and the community around the disaster site. Data analysis technique steps in this research are, data collection, data reduction, data display and conclusion. The results of the study show that the 2021 Disaster Management Budget Accountability (Covid-19) has not been effective because there are still shortages imitations of Resources in Management, Accuracy and goals and targets. as well as differences inion on the suitability of prices during normal times and during disasters. |
| **KEYWORDS**  **Accountability, Budget, Management, Disaster** |
| **This is an open access article under the**  [**CC–BY-SA**](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) **license** |

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara dengan tingkat rawan bencana yang tinggi karena Indonesia berada dalam kawasan Ring Of Fire yang artinya Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang aktif. Bencana merupakan kejadian luar biasa yang menyebabkan kerugian baik secara materi maupun non-materi. Bencana seringkali mengancam keberlangsungan pemerintahan di suatu wilayah apabila pemerintah setempat lumpuh dihantam bencana. Oleh sebab itu perlunya kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana baik itu sebelum terjadi, saat terjadi dan setelah terjadinya bencana (Uswatun Hasanah, 2019).

Menurut Ulum dalam Uswatun (2019) Indonesia menempati peringkat kedua data jumlah kematian tertinggi akibat bencana alam se-Asia Pasifik. Kerugian yang ditimbulkan akibat bencana berdasarkan data yang dirilis oleh The Asia Pasific Disaster Report yang disusun oelh The Economic and Social Commision for Asia and Pasific (ESCAP) dan The United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) menunjukkan bahwa selama 20 tahun terakhir, berbagai bencana alam di Indonesia telah mengakibatkan kerugian ekonomi setidaknya $22,5 miliar.

Untuk menghadapi dampak dari bencana tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang- Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk penyelenggaraan dan tata kelola penanggulangan bencana, Peraturan Daerah Nomor 8 Tentang Penetapan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 38 tentang Penjabaran APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2021. Untuk mematangkan kelembagaan, Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Salah satu prinsip utama dan sangat penting dalam mewujudkan good governance adalah akuntabilitas. Dalam kehidupan dunia birokrasi pemerintah, akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan dan memperlihatkan pencapaian misi organisasi. Secara eksistensi, organisasi birokrasi pemerintah dirancang untuk memenuhi kepentingan publik, dan karena itu masalah pertanggungjawaban tindakan dan kebijakan pemerintah kepada publik menjadi fokus dari akuntabilitas.

Schacter (2000:1) selanjutnya menegaskan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pada dasarnya memiliki dua tujuan utama. Pertama, tujuan politik (political purpose), yaitu akuntabilitas merupakan suatu mekanisme untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, tujuan operasional (operational purpose), yaitu akuntabilitas merupakan mekanisme untuk membantu menjamin pemerintah bertindak secara efektif dan efisien.

Penelitian terdahulu tentang akuntabilitas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agus Subroto pada tahun 2008 yang mengangkat judul penelitian yaitu “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupatten Temanggung Tahun 2008)”. Hail penelitian yang didapatkan ialah perencanaan pelaksana program Alokasi Dana Desa di 12 desa se Kecamatan Tlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif dan transparansi, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.

Penelitian lainnya yang membahas tentang akuntabilitas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Paulus Israwan Setyoko pada tahun 2011 yang mengangkat judul penelitian “Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)”. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu pengelolaan keuangan negara pada tingkat desa belum berhasil. Sistem dan mekanisme pelaporan keuangan yang telah disusun dengan baik dan rinci oleh pemerintah kabupaten, ternyata tidak dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemerintah desa. Kegagalan ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan administrasi aparat pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa pada tingkat desa akuntabilitas pengelolaan keuangan masih belum baik, karena rata-rata kemampuan aparat pemerintah desa yang terbatas. Akuntabilitas pada tingkat provinsi pun terutama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu masih terdapat ketidakteraturan dalam pengelolaan anggaran terutama anggaran penanggulangan bencana. Dari hasil pra penelitian yang dilakukan, hasil laporan keuangan pengelolaan anggaran di BPBD belum transparansi. Artinya masih terdapat beberapa anggaran yang pelaporan dan perencanaan tidak sesuai dengan target. Terjadi ketimpangan dalam realisasi perencanaan keuangan bagi anggaran penanggulangan bencana. Kondisi yang terjadi pada BPBD dalam akuntabilitas anggaran penanggulangan bencana yang belum sempurna. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apasaja yang dilakukan atau dilaksanakan dalam penanganan bencana berkaitan dengan anggaran penanggulangan bencana dan mencari solusi dari permasalahan tersebut.

**METODE PENELITIAN**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif, yaitu mendiskripsikan kondisi yang dilihat berdasar aspek penelitian yang ditentukan sebelumnya. Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan Data : Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Adapun data yang di dapatkan dalam penelitian ini berupa dokumentasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Penanggulangan Bencana Tahun 2021, serta Wawancara dengan sekretaris Badan, Kesubbag Program dan Perencanaan BPBD Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Anggaran Bencana Tahun 2021. Selanjutnya Reduksi Data. Menurut Sugiyono (2010: 338). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam hal ini Peneliti menemukan Tim yang berkoordinasi dalam Penganggaran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN (BNPB) dan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/2903/SJ tanggal 3 Juni 2015 tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga. Langkah berikutnya display data, menurut Amailes dan Huberman (Sugiyono, 2010: 341) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Dalam hal ini peneliti mengemukakaan data berupa Narasi dan Dokumentasi yang didapat dari Observasi di lingkungan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu. Akhirnya pada pengambilan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2010: 345) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini akan menjelaskan setiap aspek penelitian yang diteliti berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan serta didukung dengan teori-teori yang memperkuat informasi yang didapatkan.

1. Adanya Kesesuaian Antara Pelaksanaan dengan Standard Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana (Covid-19) Tahun 2021

Dalam pengelolaan anggaran kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu, penggunaan atau pelaksanaan penggunaan anggaran juga sudah berpedoman dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Mengingat anggaran yang dikelola bersifat untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, maka sejak awal selalu ditekankan untuk melakukan pengelolaan anggaran kebencanaan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Proses penggunaan anggaran kebencanaan pun sifatnya segera tanpa adanya penundaan, karena anggaran tersebut akan segera digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana, seperti pemberian bantuan tenda darurat, logistik makanan dan obat-obatan, pakaian layak serta bantuan kebencanaan lainnya. Penggunaan anggaran pun selain harus sesuai dengan prosedur yang ada, kesesuaian anggaran pun juga harus diperhitungkan. Baik besaran anggaran yang tersedia dan juga realisasi penggunaan yang sesuai kebutuhan. Dengan mengikuti prosedur yang ada dan mempertimbangkan besaran anggaran serta realisasinya maka akan tercipta pengelolaan anggaran yang baik dan akuntabel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu, selalu menekankan kepada para pegawainya terutama pada bagian yang bertugas mengelola anggaran untuk selalu bekerja sesuai pedoman dan aturan yang berlaku dalam pengelolaan anggaran bencana. Mengingat bahwa dalam pengelolaan anggaran selalu berpotensi timbulnya kecurangan ataupun permainan dalam pengelolaan anggaran jika tidak selalu berpedoman pada standar prosedur dan aturan yang ada. Untuk Tahun 2021 BPBD Provinsi Bengkulu menggunakan SOP untuk Penanggulangan Covid-19 ( Bencana Non Alam ). Diketahui bersama bahwa bencana sangat memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat yang terdampak. Baik dampak materiil maupun moril masyarakat yang akan mengalami gejala trauma setelah mendapati bencana. Maka dari itu, pengelolaan anggaran yang sesuai prosedur, dapat langsung memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana. Masyarakat pun akan merasa sangat terbantu apabila bantuan dari pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah langsung dapat dirasakan.

2. Adanya Transparansi Penggunaan Anggaran Pengelolaan anggaran tidak hanya pada masalah kesesuaian antara pelaksanaan dan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan. Namun keterbukaan informasi dalam penggunaan anggaran pun sangat penting dilakukan guna untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan anggaran. Transparansi merupakan keterbukaan dalam suatu pengelolaan administrasi, baik administrasi umum maupun administrasi keuangan. Keterbukaan informasi mengenai pengelolaan anggaran mulai diterapkan beberapa tahun belakang. Hal ini dikarenakan maraknya kasus penyalahgunaan anggaran, baik anggaran tingkat desa maupun anggaran pemerintah pusat. Dengan banyak kasus korupsi yang terjadi, akhirnya pemerintah membuat kebijakan untuk transparansi terutama dalam pengelolaan anggaran. Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang saat ini sedang gencar diterapkan oleh setiap pemerintah daerah untuk menciptakan good government. Reformasi birokrasi ialah, penerapan kebijakan untuk bekerja sesuai tugas, prosedur dan tepat waktu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu selaku penanggungjawab pengelolaan dana kebencanaan di Provinsi Bengkulu tentunya memiliki kewajiban untuk melakukan keterbukaan dalam pengelolaan dana kebencanaan langsung terhadap masyarakat dan bisa juga sesama pimpinan dan pegawai yang ada di Badan Pengelolaan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu serta pihak-pihak yang terkait dalam pengawasan pengelolaan anggaran kebencanaan.. Keterbukaan informasi bisa saja Pentingnya keterbukaan agar tidak adanya saling kecurigaan yang nantinya dapat mengganggu kenyamanan dan kualitas kinerja. Keterbukaan informasi dapat tercipta dengan baik bila semua peran saling berkontribusi. Baik pimpinan, pegawai pengelola anggaran dan juga lingkungan kerja. Semua pihak saling berperan untuk menciptakan reformasi birokrasi dalam keterbukaan informasi. Pimpinan harus selalu memberikan contoh bekerja yang baik kepada pegawainya, harus selalu mengarahkan kepada pegawainya untuk bekerja sesuai dengan aturan yang ada dan mengutamakan kualitas kerja yang baik. Menjalin komunikasi yang baik kepada pegawai juga penting dilakukan, agar terciptanya situasi kerja yang baik. Pegawai pengelola anggaran pun, juga harus bekerja sesuai arahan dari pimpinan. Jika ada sesuai yang membuat tidak nyaman dalam bekerja, sebaiknya segera di komunikasikan kepada pimpinan agar mendapatkan solusi yang baik. Komunikasi terhadap teman-teman pegawai juga harus terjalin dengan baik, agar tercipta kerjasama yang baik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

3. Adanya Efektivitas Penggunaan Anggaran. Efektivitas dalam penggunaan anggaran ialah ukuran seberapa maksimal penggunaan anggaran dan seberapa besar dampak yang diberikan dari penggunaan anggaran tersebut. Sebagai contoh, terdapat anggaran untuk penyediaan logistik bagi korban bencana, lalu pengguna anggaran mengusulkan untuk penggunaan anggaran tersebut. Setelah dana digunakan, maka dari laporan akhir yang dilaporkan dapat menunjukkan apakah semua kebutuhan logsitik terpenuhi sesuai dengan dana yang diusulkan dan juga apakah pelaporan penggunaan dana tersebut sudah sesuai dengan anggaran yang disediakan. Efektivitas dalam penggunaan anggaran menunjukkan bahwa pengelola anggaran mampu memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut tidak hanya dalam hal pelaporan tetapi dampak yang diberikan atas digunakannya dana tersebut bagi masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam hal pengelolaan anggaran kebencanaan yang dilakukan selama ini oleh tim pengelola anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu sudah cukup efektif. Hal ini dikarenakan kerjasama serta komunikasi yang baik terjalin dalam pengelolaan anggaran kebencanaan di Badan Penangggulangan Bencana Daerah. Pimpinan selalu mengawasi para pegawainya dalam mengelola anggaran, selalu berkomunikasi dan memberikan arahan kepada pegawainya. Tim pengelola anggaran juga selalu berkoordinasi dengan pimpinan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran. Jadi apabila timbul permasalahan atau hambatan maka akan langsung dikomunikasikan dengan pimpinan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Efektivitas tidak hanya sekedar dalam bentuk laporan yang sesuai, namun juga proses dari mencapai efektifitas tersebut juga penting. Karena tanpa dukungan kerjasama yang baik dalam pengelolaan anggaran belum tentu akan tercapai keefektifan penggunaan anggaran.

4. Adanya Kesesuaian Pengeluaran Dana. Kesesuaian pengeluaran dana juga masih terkait dengan efektifitas penggunaan dana. Namun dalam hal ini kesesuaian pengeluaran dana yang dimaksud ialah kesesuaian antara rencana anggaran, usulan penggunaan anggaran serta realisasi penggunaan anggaran. Dalam pengelolaan anggaran, tentunya kesesuaian dana sangat penting karena hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan anggaran sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Jika terjadi ketidaksesuaian apalagi terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana, maka perlu adanya perbaikan dalam system pengelolaan anggaran. Dalam proses pengusulan penggunaan anggaran tentunya di awal akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu usulan yang masuk apakah sesuai dengan anggaran yang disediakan. Tujuannya adalah memastikan bahwa usulan kebutuhan anggaran yang di usulkan sudah ada di dalam anggaran. Kemudian, kesesuaian berikutnya ialah setelah dana dicairkan untuk digunakan, lalu akan dicek dalam penggunaan dana tersebut apakah sudah sesuai peruntukan kebutuhan. Jika terjadi ketidaksesuaian atau kelebihan dalam penggunaan dana, maka biasanya dana tersebut akan dikembalikan atau disetorkan ke Kas Daerah.

5. Adanya Sanksi. Dalam pengelolaan anggaran tentunya jika terdapat kesalahan dalam penggunaan anggaran aka nada sanksi atau hukuman yang diberikan sebagai bentuk tanggungjawab dan juga sebagai bentuk edukasi agar lebih hati- hati dan lebih teliti dalam mengelola anggaran agar tidak terjadi kesalahan. Dalam system administrasi, sanksi yang biasanya diberikan ada beberapa tingkatan, bisa sanksi teguran, bisa sanksi penurunan atau penundaan kenaikan pangkat, dan yang paling berat ialah sanksi pemecatan. Jika kesalahan yang terjadi tidak terlalu beresiko dan masih dapat diperbaiki, maka sanksi yang diberikan hanya sanksi teguran untuk tidak melakukan kesalahan tersebut. Jika kesalahan yang dilakukan menggangu kinerja terutama bagian pengelolaan keuangan, sanksi yang diberikan biasanya dilakukan pemindahan atau mutasi ke bagian lain. Namun jika kesalahan yang diberikan sudah sangat fatal dan merugikan instansi serta Negara maka sanksi yang diberikan bisa saja pemecatan. Adanya sanksi bukan hanya menjadi hukuman dan pelajaran bagi yang melakukan kesalahan. Tetapi juga menjadikan pelajaran bagi semua pihak agar selalu berhati-hati dan teliti saat bekerja. Kualitas kerja harus diutamakan agar hasil kerja menjadi maksimal, bukan kuantitas kerja banyak tetapi merugikan. Dalam pengelolaan anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu, juga diterapkan sanksi-sanksi bagi pegawai yang melakukan kesalahan sebagai bentuk tanggungjawab atas kesalahan yang diperbuat. Dengan adanya sanksi bukan berarti pegawai harus takut dan khawatir dalam bekerja, justru adanya sanksi tersebut membuat pegawai harus berhati-hati dalam bekerja. Jika ada sesuatu permasalahan, maka harus segera dikomunikasikan kepada pimpinan agar dicarikan solusinya.

6. Adanya Pengawasan Dari Masyarakat. Pengawasan dalam pengelolaan dana kebencanaan tidak hanya peran dari pengawas internal maupun eksternal. Masyarakat sebagai penerima bantuan dari dana kebencanaan juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap bentuk bantuan dana yang diberikan. Jika masyarakat memiliki bukti adanya ketidaksesuaian antara bantuan yang dianggarkan dengan bantuan yang diterima maka masyarakat dapat melaporkan hal tersebut disertai dengan bukti otentik. Masyarakat bisa melaporkan langsung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun langsung ke pihak- pihak yang melayani keluhan dari masyarakat.

7. Adanya Output dan Outcome yang Terukur. Dalam pengelolaan anggaran kebencanaan tentunya ada output dan outcome yang ingin dicapai. Apalagi dalam hal kebencanaan tentunya output yang di inginkan ialah masyarakat dapat merasa kondusif, aman dan nyaman pasca terjadi bencana. Masyarakat juga diharapkan tetap selalu sehat dan kebutuhan pangan tercukupi. Sedangkan dalam hal outcome yang ingin dicapai ialah tersedianya tenda darurat bagi masyarakat terdampak bencana. Adanya bantuan fasilitas dapur umum serta MKC, serta adanya bantuan kesehatan berupa obat- obat bagi mereka yang sakit maupun vitamin untuk menjaga kesehatan. Output dan outcome dapat berjalan sesuai perencanaan, bisa saja tidak sesuai atau melebihi target. Semua tergantung dari kesiapan tim tanggap bencana serta anggaran penanggulangannya. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu memiliki output dan outcome kegiatan penanganan bencana yang sesuai perencanaan dan target. Karena semua persiapan sudah direncanakan dengan baik agar kedua perencanaan tersebut berjalan dengan baik.

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran, setiap proses sudah menyesuaikan dengan Standar Operasional yang telah ditetapkan, hal ini sebagai salah satu bentuk disiplin dalam melaksanakan pengelolaan anggaran, Sebagai sebuah entitas, pemerintah wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan/ akuntansi yang berlaku secara umum. Standar penyelenggaraan akuntansi pemerintah saat ini ditopang juga dengan adanya beberapa peraturan lain yang memiliki tujuan yang sama. Aturan tersebut harus mampu dilaksanakan oleh semua pihak dengan harapan mampu meminimalisir berbagai macam bentuk penyelewengan dan tantangan yang besar dalam mencapai prestasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Dalam penggunaan anggaran, selalu ditekankan untuk keterbukaan informasi karena untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan penggunaan anggaran Laporan keuangan yang dapat diandalkan. Keandalan informasi adalah suatu keharusan agar pimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat.Agar keputusan yang diambil oleh pemerintah tepat sesuai dengan kebutuhan. Andal yang dimaksud adalah informasi menjelaskan fakta yang sebenarnya, sehingga dapat menghindari kesalahan saji yang dilaporkan dalam laporan keuangan; dalam hal ini Peneliti dapat langsung melihat Buku Kas Umum Belanja Tidak Terduga

3. Dalam hal efektifitas penggunaan anggaran berdasarkan pembahasan di atas dirasa sudah cukup baik, bantuan bagi korban bencana selalu disegerakan dan diberikan kepada mereka yang terdampak bencana , Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan instansi harus mampu menerapkan prinsip efektif dan efisien dan dapat memberikan manfaat dalam membangun dan mengembangkan system, saran dan prasarana penanggulangan yang terpadu dan terorganisir. Dalam hal ini peneliliti mendapati dokumentasi kegiatan dalam penanggulangan Bencana tahun 2021.

4. Untuk kesesuaian penggunaan dana masih terjadi adanya kelebihan pencairan dana, sehingga selalu dilakukan pengembalian kepada Kas Daerah. Pengawasan juga selalu dilakukan kepada setiap pengguna anggaran yang memberikan laporan penggunaan anggaran; dalam hal ini fakta yang ditemukan berupa Bukti setor Ke Kas Daerah Anggaran Penanggulangan Bencana Tahun 2021.

5. Sanksi selama ini disesuaikan dengan kesalahan yang terjadi. Dalam hal kesalahan penggunaan anggaran masih terjadi pengembalian kelebihan bayar karena ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dengan usulan penggunaan anggaran, pengendalian intern harus dipantau secara kontinyu sebagai bagian dari proses pelaksanaan kegiatan pengendalian yang baik. Tindakan perbaikan harus dilakukan ketika terdapat temuan audit; BPBD Provinsi Bengkulu menindaklanjuti Jawaban atas temuan dari hasil Audir BPKP dan BPK selaku Auditor Anggaran Penanggulangan Bencana Tahun 2021.

6. Masyarakat untuk saat ini belum memiliki peran yang penting dalam pengawasan anggaran kebencanaan. Masyarakat terkadang hanya berfokus pada bantuan yang diterima, dan belum terlalu peduli bantuan tersebut sesuai atau tidak dengan pelaporannya. dukungan dari masyarakat dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah akan sangat membantu terwujudnya semua harapan atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tercapainya semua target kegiatan dapat dipantau melalui indikator dari setiap rincian kegiatannya

7. Akuntabilitas penggunaan anggaran sudah cukup baik, hanya perlu pengawasan pada penggunaan anggaran agar tidak terjadi kelebihan pembayaran maupun penyalangunaan anggaran. dalam rangka untuk mewujudkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas terlaksananya tugas dan target capaian dalam mengelola sumber daya dan menjalankan kebijakan/program pemerintah, yang disusun dengan azas akuntabilitas yang baik. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan target dan sasaran kinerjanya kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

**REFERENSI**

BPBD Provinsi Bengkulu, 2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD Provinsi Bengkulu. Bengkulu

Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Bungin & Burhan. (2008). Analisa Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Suharto, Sugeng .2021. SEPARUH JALAN PEMBANGUNAN: Studi Evaluasi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepahiang , CV. Nas Media Pustaka, Jogjakarta. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,

dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta

Sukandarrumidi. 2002. Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula. Jogjakarta : Pustaka Pelajar

Suliyanto (2018). Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi. Yogyakarta: Andi Offset.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/2903/SJ Tanggal 3 Juni 2015 tentang Pendanaan Tanggap Darurat dari Belanja Tidak Terduga.

Peraturan Kepala Badan Naisonal Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Penetapan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021

Peraturan Kepala Daerah Nomor 38 tentang Penjabaran APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2022.